

RENCANA KERJA TAHUNAN 2021



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Balikpapan tahun 2021 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun 2021 yaitu sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja KKP Kelas II Balikpapan Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini selain menjelaskan tentang hasil pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas permasalahan yang ditemui pada Tahun 2020, juga menjelaskan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan fokus dalam upaya pencapaian kinerja secara lebih optimal.

Kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2021.



Balikpapan, 20 Desember 2020
Kepala Kantor,

dr. M. Zainul Mukhorobin, MMRS
NIP. 197007092001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN	4
BAB III PENUTUP.....	10

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugas Pokok dan Fungsi KKP Kelas II didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Kelas II Balikpapan sesuai dengan yang telah direncanakan maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan dimana RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan KKP Kelas II Probolinggo, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala KKP Kelas II Probolinggo dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

I.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

I.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 sebagaimana telah diubah dalam Permenkes RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

BAB II
RENCANA KERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	KKP Kelas II Balikpapan
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program yang didukung	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah 2. Dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kegiatan dan pendanaan

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2021	Alokasi 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan haji di bandara • Pelayanan kesehatan di pelabuhan /bandara/ lintas batas • Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara • Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut 	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	1.539.729	966.592.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan • Pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan dan bandara 	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	147.173.000

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2021	Alokasi 2021
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kegawatdaruratan 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengendalian vector DBD • Layanan survei vektor pes • Layanan pengendalian vector diare • Layanan survei vektor DBD • Layanan survei vektor malaria • Layanan survei vector diare • Penyelidikan epidemiologi 	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	90%	257.104.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan e monev 	Nilai kinerja anggaran	83	3.000.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan 	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	25.200.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan zona integritas WBK 	Kinerja implementasi WBK satker	76	5.393.0000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM 	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	106.200.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan

No	Klasifikasi Output	Tahun 2021			Prakiraan Maju					
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume			Alokasi (juta)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pelayanan publik kepada masyarakat	12.781	Orang	860.742	13.064	13.763	14.015	1.028.445	1.167.876	1.198.786
2	Pelayanan publik lainnya	584	layanan	834.163	1.194	1.278	1.347	2.378.117	2.488.987	2.567.945
3	Sarana bidang kesehatan	6	Paket	243.455	7	8	9	779.867	780.987	785.678
4	Layanan Pendidikan	9	Orang	106.200	84	85	86	503.011	510.876	512.456

No	Klasifikasi Output	Tahun 2021			Prakiraan Maju						
		Vol	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume			Alokasi (juta)			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	dan pelatihan internal										
5	Layanan perkantoran	2	layanan	11.698.148	2	2	2	13.029.563	13.256.986	13.467.453	
6	Layanan perencanaan dan penanggulangan internal	2	layanan	72.583	2	2	2	73.776	74.897	75.321	
7	Layanan umum	2	layanan	19.097	2	2	2	20.208	21.765	22.321	
8	Layanan SDM	5	Orang	73.988	5	5	5	74.342	75.352	76.671	
9	Layanan organisasi dan tata kelola internal	4	layanan	6.793	4	4	4	6.895	6.987	7.016	
10	Layanan kehumasan dan protokoler	1	layanan	35.642	1	1	1	36.876	37.980	38.765	
12	Pemantauan evaluasi dan pelaporan	31	laporan	306.532	31	31	31	307.876	308.432	309.321	
13	Pengelolaan keuangan negara	14	laporan	95.814	14	14	14	96.675	97.865	98.976	

B. Sumber Pendanaan

No	Rincian Output/ Komponen	Alokasi (juta)				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Pelayanan kesehatan haji					
	a. Pelayanan kesehatan haji di bandara	681.120	448.000		681.568	1 lokasi
2	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas					
	a. Pemeriksaan kesehatan masyarakat	148.394	30.780		179.174	5 lokasi
3	Layanan kekarantina kesehatan di bandar udara					
	a. Pelaksanaan kekarantina kesehatan di bandara	22.500	67.500		90.000	1 lokasi
4	Layanan kesehatan pada situasi khusus					

No	Rincian Output/ Komponen	Alokasi (juta)				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
	a. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	550	159.500		160.050	2 lokasi
5	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan					
	a. Pelayanan kegawatdaruratan	5.525			5.525	5 lokasi
6	Layanan pengendalian vector DBD					
	a. Pengendalian vector DBD	6.454	8.400		14.854	5 lokasi
7	Layanan survei vector pes					
	a. Layanan survei vector pes	34.785	81.000		115.785	5 lokasi
8	Layanan pengendalian vector diare					
	a. Pengendalian vector diare	3.990	9.000		12.990	5 lokasi
9	Layanan survei vector DBD					
	a. Pelaksanaan survei vector DBD	2.400	36.000		38.400	5 lokasi
10	Layanan survei vector malaria					
	a. Survei vector malaria	7.095	18.000		25.095	5 lokasi
11	Layanan survei vector diare					
	a. Survei vector diare	1.200	18.000		19.200	5 lokasi
12	Layanan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS					
	a. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS	15.125			15.125	5 lokasi
13	Layanan deteksi dini terduga TBC					
	a. Deteksi dini terduga TB	50.105			50.105	5 lokasi
14	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan					
	a. Pengendalian faktor risiko lingkungan	52.628				5 lokasi
15	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut					
	a. Pemeriksaan orang, barang, alat angkut	144.406	90.000		234.406	5 lokasi

No	Rincian Output/ Komponen	Alokasi (juta)			Lokasi	
		Rupiah	PNBP	PHLN		Jumlah
16	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk					
	a. Pengadaan alat dan bahan kesehatan	112.770	121.685		234.456	5 lokasi
17	Pelatihan kesehatan					
	a. Pelatihan bidang kesehatan	34.065	72.135		106.200	5 lokasi
18	Gaji dan tunjangan satker					
	a. Gaji dan tunjangan	8.005.840			8.005.840	1 lokasi
19	Operasional dan pemeliharaan					
	a. Operasional dan pemeliharaan	3.692.308			3.692.308	1 lokasi
20	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen					
	a. Penyusunan e renggar	18.538			18.538	1 lokasi
	b. Penyusunan Renja KL	12.684			12.684	1 lokasi
21	Layanan umum dan perlengkapan					
	a. Pelayanan umum dan perlengkapan	19.097			19.097	1 lokasi
22	Layanan administrasi kepegawaian Ditjen P2P					
	a. Pengelolaan administrasi kepegawaian	73.988			73.988	1 lokasi
23	Layanan organisasi dan reformasi birokrasi ditjen P2P					
	a. Layanan organisasi dan reformasi birokrasi ditjen P2P	6.793			6.793	1 lokasi
24	pelayanan humas dan protokoler					
	a. Pelayanan humas dan protokoler	35.642			35.642	1 lokasi
25	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program					
	a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	306.532			306.532	1 lokasi
26	Pengelolaan keuangan ditjen P2P					

No	Rincian Output/ Komponen	Alokasi (juta)				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
	a. Pengelolaan keuangan ditjen P2P	63.774			63.774	1 lokasi
27	Pengelolaan perbendaharaan ditjen P2P					
	a. Pengelolaan perbendaharaan ditjen P2P	32.040			32.040	1 lokasi

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2021**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	1.539.729
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	90 %
		4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	76
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 ini merupakan komitmen KKP Kelas II Balikpapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Balikpapan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Dimana diharapkan keberhasilan anggaran sejalan dengan keberhasilan kegiatan dan tercapainya output yang telah ditetapkan. Pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh KKP kelas II Balikpapan tahun 2021.